



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP) TAHUN 2023



**DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA
TANJUNGPINANG**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang dibebankan kepada OPD. LAKIP ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Secara eksternal, LAKIP dapat berperan sebagai alat penilai kinerja secara kualitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan secara internal, LAKIP merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi yang ada di lingkungan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, DPPP Kota Tanjungpinang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan pada Urusan Pangan, Urusan Pertanian dan Urusan Perikanan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, DPPP Kota Tanjungpinang ditetapkan sebagai penggerak untuk melaksanakan fungsi di bidang tugasnya yang mempunyai peran strategis untuk meningkatkan pemantapan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

Demikianlah LAKIP Tahun 2023 ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah.

Tanjungpinang, Januari 2024

Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
Kota Tanjungpinang,



YONI FADRI

Pembina Tk.1

NIP. 19700503 200312 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Dinas	2
1.3. Isu Strategis	7
1.4. Sistematika Laporan.....	.8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis Organisasi	9
2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023.....	11
2.3. Perjanjian Kinerja	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	18
3.3. Akuntabilitas Keuangan	43
BAB IV. PENUTUP	51
LAMPIRAN	
Rencana Kinerja Tahunan 2023	
Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Data-data Penunjang	
Laporan Realisasi Program/Kegiatan T.A 2023	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan	5
Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	5
Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.....	6
Tabel 4. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.....	6
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 untuk eselon II.....	12
Tabel 6. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	16
Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	16
Tabel 8. Target dan Realisasi Indikator Skor PPH Ketersediaan.....	19
Tabel 9. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Tahun 2023.....	19
Tabel 10. Indikator dan Capaian Program pada sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan	20
Tabel 11. Target dan Realisasi Indikator Skor PPH Konsumsi.....	21
Tabel 12. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi tahun 2023.....	22
Tabel 13. Indikator dan Capaian Program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan.....	23
Tabel 14. Target dan Realisasi Indikator Persentase Rata-rata Peningkatan produktivitas Pertanian	25
Tabel 15. Indikator dan Capaian Program pada Meningkatnya produktivitas Pertanian.....	26
Tabel 16. Luas Tanam, Luas panen dan produksi pertanian Kota Tanjungpinang	27
Tabel 17. Target dan Realisasi Indikator jumlah populasi ternak.....	30
Tabel 18. Perubahan Jumlah Populasi Ternak Tahun 2022 dan 2023.....	31
Tabel 19. Indikator dan Capaian Program pada Meningkatnya Produktivitas Peternakan.....	32
Tabel 20. Target dan Realisasi Indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.....	36

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**

Tabel 21	Target dan Realisasi Indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	37
Tabel 22	Luas Areal Budidaya, RTP dan Produksi Perikanan Budidaya.....	38
Tabel 23	Target dan Realisasi Indikator Persentase Rata-rata Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya.....	39
Tabel 24	Capaian Indikator Program Pengembangan Budidaya Perikanan	39
Tabel 25	Target dan Realisasi Indikator Nilai Ekspor Perikanan	41
Tabel 26	Capaian Indikator Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	42
Tabel 27	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.....	42
Tabel 28	Rincian Realisasi Belanja Operasi Per Jenis Belanja Tahun 2023.....	43
Tabel 29	Realisasi Belanja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023... ..	44

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Kota Tanjungpinang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Tanjungpinang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berasaskan otonomi dan tugas pembantuan pada urusan pangan, urusan pertanian dan urusan perikanan. Tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan oleh Sekretariat SKPD dengan 3 (tiga) sub bagian dan 4 (lima) bidang dengan 10 (sepuluh) seksi serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.

DPPP Kota Tanjungpinang mempunyai sasaran dan tujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat dengan terpenuhinya pangan sampai tingkat rumah tangga. Hal lain yang menjadi sasaran dan tujuan dinas adalah meningkatkan produksi pada sektor pertanian dan perikanan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya meningkatkan PDRB sektor pertanian.

Tujuan dan sasaran dari Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang merupakan salah satu rangkaian dalam proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk kegiatan atau operasionalnya. Sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) serta indikator kinerja lainnya. Sebagaimana yang akan diuraikan pada Bab II tentang Rencana Strategis, dimana Tahun 2023, DPPP Kota Tanjungpinang menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja.

Sasaran strategis tersebut dan tingkat capaiannya pada Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Sasaran strategis 1 : *Meningkatkan Ketersediaan Pangan***. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator, yaitu :
Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, target yang ditetapkan adalah 68% dan realisasinya 67,99% dengan capaian kinerja sebesar 99,99 %.

2. **Sasaran strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan.**

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator, yaitu :

Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, target yang ditetapkan adalah 96% dan realisasinya 91,10% dengan capaian kinerja sebesar 95,00%.

3. **Sasaran strategis 3 : Meningkatnya Produktivitas Pertanian Peternakan.** Sasaran ini diidentifikasi 2 (dua) indikator sasaran, yaitu :

1. Persentase Rata-rata Peningkatan Produktivitas Pertanian, target yang ditetapkan adalah 20% dan realisasinya 20% dengan capaian kinerja sebesar 100,00 %.

2. Jumlah Populasi Ternak, target yang ditetapkan adalah 378.721 ekor dan realisasinya 293.227 ekor dengan capaian kinerja sebesar 77,77 %.

4. **Sasaran strategis 4 : Meningkatnya Produktivitas Perikanan.** Sasaran ini diidentifikasi 3 (tiga) indikator sasaran, yaitu :

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, target yang ditetapkan adalah 3.700 ton dan realisasinya 4.385,24 ton dengan capaian kinerja sebesar 118,52%.

2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya, target yang ditetapkan adalah 150 ton dan realisasinya 182,57 ton dengan capaian kinerja sebesar 121,71%.

3. Persentase Rata-rata Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya, target yang ditetapkan adalah 17% dan realisasinya 17,19 % dengan capaian kinerja sebesar 101,00%.

5. **Sasaran strategis 5 : Meningkatnya Daya Saing Produksi Perikanan** , Sasaran ini diidentifikasi 1 (satu) indikator sasaran, **Nilai Ekspor Perikanan**, target yang ditetapkan adalah 19.416.796.405 miliar dan realisasinya 7.051.462.000 miliar dengan capaian kinerja sebesar 36,06%.

Capaian kinerja sasaran secara umum tercapai, kecuali pada sasaran meningkatnya produktivitas pertanian peternakan untuk indikator

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**

Persentase rata-rata peningkatan produktivitas pertanian menunjukkan hasil rendah dan pada sasaran meningkatnya meningkatnya daya saing produksi perikanan juga menunjukkan hasil yang rendah pada indikator nilai ekspor perikanan.

BAB
I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang

diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama pada tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Tanjungpinang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan pada Urusan Pangan, Urusan Pertanian dan Urusan Perikanan. Tugas pokok yang dilaksanakan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam rangka menyelenggarakan fungsinya adalah sebagai Perumus kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggara pelayanan serta pembinaan pelaksanaan tugas pada Urusan Pangan, Urusan Pertanian dan Urusan Perikanan.

OPD ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Urusan Pangan dan Urusan pilihan pada Urusan Pertanian dan Urusan Perikanan.

Dalam melaksanakan urusan pemerintah tersebut ditetapkan tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang. Dengan struktur organisasi terdiri dari Sekretariat dengan 3

(tiga) sub bagian dan 4 (empat) Bidang dengan 10 (sepuluh) seksi serta UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional. UPTD dan kelompok jabatan fungsional sampai saat ini belum berfungsi.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub. Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Sub. Bagian Keuangan.
3. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - a. Seksi Perikanan Tangkap.
 - b. Seksi Perikanan Budidaya.
 - c. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Perikanan.
4. Bidang Pertanian, membawahkan:
 - a. Seksi Tanaman Pangan dan Perkebunan.
 - b. Seksi Tanaman Hortikultura.
5. Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
 - a. Seksi Peternakan.
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
6. Bidang Pangan, membawahkan :
 - a. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
 - b. Seksi Distribusi dan Kerawanan Pangan.
 - c. Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
7. UPTD.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang memiliki peran dalam mewujudkan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2013-2018. Adapun perannya adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan rencana program dan kegiatan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik dengan melakukan pengelolaan sumber daya pertanian dan perikanan.
2. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang menyangkut pengelolaan potensi sumber daya alam pertanian, peternakan dan perikanan, melalui pelatihan pada petani dan nelayan, penyediaan sarana dan prasarana produksi penunjang untuk pengembangan usahanya serta bimbingan teknis di lapangan.
3. Melakukan pendataan, pengolahan data dan penyampaian informasi yang dibutuhkan publik terkait kesehatan hewan dan ketahanan pangan.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian dan perikanan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi dinas tersebut, dalam pelaksanaannya didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Kondisi sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kondisi Sumber daya Manusia.

Sumber daya manusia yang ada di OPD terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan tenaga honorer dinas. Jumlah ASN dan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer), sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2023

NO.	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)							JUMLAH (ORANG)
		S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	TS	
1.	ASN	3	32	4	3	-	-	-	42
2.	P3k		7	1					8
3.	PTT	-	13	2	9		-	1	25
4.	Tenaga Honor Dinas	-	3	-	17	4	8	1	33
JUMLAH		3	55	7	29	4	8	2	108

Komposisi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang menurut pangkat dan golongan sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan Tahun 2023.

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda / IVc	-
2.	Pembina Tk. I / IVb	2
3.	Pembina / IVa	4
3.	Penata Tk.I /IIIId	23
4.	Penata / IIIc	3
5.	Penata Muda Tk. I / IIIb	8
6.	Penata Muda / IIIa	1
7.	Pengatur Tk. I /IIId	
8.	Pengatur / IIc	1
9.	Pengatur Muda Tk.I /IIb	-
10	Gol IX	7
11	Gol VII	1
Jumlah		50

Jumlah Pegawai berdasarkan bidang-bidang di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, sesuai kebutuhan dan jumlah pegawai yang ada, sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2023.

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai sesuai ABK	Jumlah Pegawai yang Ada		
			ASN/P3K	PTT	THL
1.	Sekretariat	26	13	6	7
2.	Bidang Perikanan	22	14	5	3
3.	Bidang Pertanian	18	5	5	8
4.	Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	29	10	4	15
5.	Bidang Ketahanan Pangan	13	8	5	-
Jumlah		108	50	25	33

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang meliputi asset tetap dan asset bergerak, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2023.

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1.	Kendaraan Roda Dua.	16 unit	11 unit	5 unit	-
2.	Kendaraan Roda Tiga.	5 unit	1 unit	1 unit	3 unit
3.	Kendaraan Roda Empat.	6 unit	4 unit	2 unit	-
4.	Mini Eskavator.	1 unit	-	-	1 unit
5.	Speed Boat.	2 unit	-	1 unit	1 unit
6.	Gudang Pakan Sapi.	1 unit	1 unit	-	-
7.	Tower Air dan Salurannya.	2 unit	1 unit	1 unit	-
8.	Toilet Umum.	4 unit	4 unit	-	-
9.	Pos Jaga Perikanan.	1 unit	-	1 unit	-
10.	Rumah Jaga.	3 unit	3 unit	-	-

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
11.	Kandang Ternak.	3 unit	1 unit	2 unit	-
12.	Rumah Potong Hewan	1 unit	-	1 unit	-
13.	Rumah Potong Unggas	1 unit		1 unit	-
14.	Jalan Paving Blok	2 lokasi	1 unit	-	-
15.	Sumber Air	2 unit	1 unit	1 unit	-
16.	Rumah Kompos	1 unit	1 unit	-	-
17.	Sapi Betina	2 ekor	2 ekor	-	-
18.	Sapi Jantan	6 ekor	6 ekor	-	-
19.	Gerai Pangan	1 unit	1 unit	-	-
20.	Puskesmas Kp.Bugis	1 unit	-	1 unit	-
21.	Rumah jaga RPH Babi	1 unit	-	1 unit	-

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang, dirumuskan beberapa isu strategis.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengembangan pangan lokal. Untuk memenuhi ketersediaan pangan, porsi pasokan pangan dari luar daerah jauh lebih besar dari pada produksi pangan lokal.
2. Belum optimalnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman karena masih dipengaruhi kebiasaan dan tradisi.
3. Masih rendahnya produksi perikanan tangkap dan volume ekspor perikanan akibat keterbatasan armada dan alat-alat penangkapan ikan.
4. Masih terbatasnya produksi perikanan budidaya.

5. Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan karena kondisi lahan, minat petani dan peternak yang rendah dan terbatasnya pemanfaatan teknologi
6. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan dan penataan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
7. Belum terbentuknya tata kelola rantai distribusi pangan dari hulu ke hilir yang efektif dan efisien
8. Belum tersedianya regulasi terkait perizinan usaha sektor peternakan, Kesehatan hewan dan Kesehatan Veteriner serta lalulintas hewan/produk hewan.

1.4 Sistematika Laporan

Laporan ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum Organisasi
- 1.2. Aspek Strategis Organisasi
- 1.3. Sistematika Laporan

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS

- 2.1. Rencana Strategis Organisasi
- 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2023
- 2.3. Perjanjian Kinerja

B AB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Akuntabilitas Keuangan

B AB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Perencanaan strategis merupakan rencana tindakan yang telah disusun untuk kurun waktu 2013-2018 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD sebagai *platform* bagi unit kerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang atas pelaksanaan visi dan misi kepala daerah yang akan dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi dan misi Kepala daerah dalam RPJMD, tertuang sebagai visi dan misi dalam Renstra OPD.

Visi Walikota Tanjungpinang tahun 2018-2023 yaitu:

***“Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera
dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani.”***

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dalam rangka mencapai Visi jangka menengah, misi-misi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang agamis, berbudaya, berwawasan kebangsaan dan berdaya saing global.
2. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat.
3. Mengembangkan dan melestarikan khasanah budaya lokal dan nusantara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, bertoleransi dan kebhinekaan guna mendukung pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas dan kompeten.
5. Melanjutkan pembangunan yang adil dan merata serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif yang berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang mengarah pada pencapaian unsur visi: **KOTA YANG MAJU DAN SEJAHTERA**. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke-2 yaitu: **Meningkatkan pengembangan**

pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha ekonomi masyarakat, dengan tujuan Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata, perdagangan dan jasa terhadap perekonomian daerah dan sasaran Meningkatkan Produksi Perikanan dan Terwujudnya Ketahanan Pangan.

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 adalah penjabaran dari sasaran dan program beserta indikator dan target yang telah ditetapkan dalam satu tahun yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang. Dalam rencana kinerja mencakup kesepakatan mengenai indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja dan target kinerja untuk tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang tidak terlepas dari sistem penganggaran yang diselenggarakan pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang. Berkaitan dengan anggaran tersebut harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sebagaimana diketahui anggaran suatu organisasi dimungkinkan untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Kinerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang untuk Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang menetapkan kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2023. Perjanjian kinerja atau penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 untuk melaksanakan program yang telah direncanakan sesuai Renstra 2013-2018. Pada Tahun 2023, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang menetapkan perjanjian kinerja, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Tahun 2023 untuk eselon II.

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	68%	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	Rp. 443.531.400.
2.	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	95%	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 51.784.000
3.	Meningkatnya Produktivitas Pertanian Peternakan.	Persentase Rata-rata Peningkatan Produktivitas Pertanian.	20%	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.	Rp. 595.983.300 Rp. 398.869.765

				Program Penyuluhan Pertanian.	Rp. 790.829.000
		Jumlah Populasi Ternak.	378.721 Ekor	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	Rp. 376.458.379
4.	Meningkatnya Produktivitas Perikanan.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.	3.700 Ton		
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya.	150 Ton	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.	Rp 539.361.000
		Persentase Rata-rata Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya.	17 %		
5.	Meningkatnya Daya Saing Produksi Perikanan.	Nilai Ekspor Perikanan	Rp. 19.416.796.405,-		

Penetapan sasaran, indikator kinerja dan target pada perjanjian kinerja tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD dan merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD sebagai indikasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran OPD antara lain : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Persentase Rata-rata Peningkatan Produktivitas Pertanian, Jumlah Populasi Ternak, Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Persentase Rata-rata Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya dan Nilai Ekspor Perikanan.

BAB

III

**AKUNTABILITAS
KINERJA**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Salah satu hal dasar yang dilakukan dalam menentukan capaian kinerja organisasi adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran ini dilakukan secara triwulan dan tahunan. Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menerapkan aplikasi sistem e-sakip pada setiap OPD dalam hal pelaporan pengukuran kinerja secara triwulan dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan posisi kinerja OPD. Melalui pengukuran kinerja, maka akan dapat dilakukan analisa dan evaluasi penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya dapat menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai sasaran pada tahun selanjutnya.

Penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja, mengevaluasi dan mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Hasil penilaian capaian kinerja dikriteriakan sebagai berikut :

Tabel 6. Skala Nilai Peringkat Kinerja.

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Untuk mengetahui keberhasilan dan pencapaian kinerja, maka perlu adanya pengukuran capaian kinerja pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut ini gambaran capaian kinerja Organisasi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang :

Tabel 7. Capaian Kinerja Tahun 2023.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase (%)	Persentase s/d akhir Renstra 2023	Kriteria / Kode
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan.	Skor PPH ketersediaan.	%	68	67,99	99,99	99,99	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan.	Skor PPH konsumsi.	%	96	91,10	95,00	95,00	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya produktivitas pertanian peternakan.	Persentase rata-rata peningkatan produktivitas pertanian.	%	20	20	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Jumlah populasi ternak.	ekor	378.721	293.227	77,00	77,00	Tinggi
4.	Meningkatnya produktivitas perikanan.	Jumlah produksi perikanan tangkap.	Ton	3.700	4.385,24	118,52	118,52	Sangat Tinggi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase (%)	Persentase s/d akhir Renstra 2023	Kriteria / Kode
		Jumlah produksi perikanan budidaya.	Ton	150	182,57	121,71	121,71	Sangat Tinggi
		Persentase rata-rata peningkatan produktivitas perikanan budidaya	%	17	17,19	101,00	101,00	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Daya Saing Produksi Perikanan.	Nilai Ekspor Perikanan	rupiah	19.416.796 .405,-	7.051.462.000	36,06	36,06	Sangat Rendah

Dari tabel di atas, terdapat 5 (lima) sasaran dengan 8 (delapan) indikator hasil capaian kinerja. Indikator yang memenuhi target yang ditetapkan dengan kriteria capaian sangat tinggi ada 6 (enam) indikator yaitu : SKor PPH Ketersediaan, Skor PPH Konsumsi, Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Jumlah Produksi Perikanan Budidaya, Persentase rata-rata peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan Persentase rata-rata peningkatan produktivitas pertanian. Indikator yang memenuhi target yang ditetapkan dengan kriteria capaian tinggi ada 1 (satu) indikator yaitu jumlah Populasi Ternak. sedangkan Capaian kinerja dengan nilai sangat rendah ada 1 (satu) indikator, yaitu : indikator Nilai Ekspor Perikanan .Tidak tercapainya target indikator disebabkan oleh berbagai faktor kendala yaitu karena saat ini eksportir mengirim ikan via Kota Batam dan Kabupaten Bintan sehingga tidak tercatat sebagai ekspor dari Kota Tanjungpinang. Faktor keberhasilan dan kegagalan pencapaian target dapat dievaluasi dan dianalisis berdasarkan data dan pelaksanaan program yang dilaksanakan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.

Pada sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang yang digambarkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis I :

Meningkatnya Ketersediaan Pangan

Diindikasikan dengan Indikator sasaran, yaitu :

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.

Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keberagaman ketersediaan pangan suatu wilayah adalah Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan. PPH ketersediaan adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang di anjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi. Skor PPH adalah rasionalisasi pola ketersediaan pangan yang dianjurkan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan pangan bagi kualitas hidup penduduk. Untuk kemudian digunakan sebagai bahan penilaian ketersediaan pangan penduduk ditinjau dari jumlah, mutu, keseimbangan gizi dan komposisi/aneekaragam pangan.

Indikator skor PPH ketersediaan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan kepada sumbangan energi dari kelompok pangan utama baik secara absolut maupun relatif dari suatu pola ketersediaan. Skor PPH Kota Tanjungpinang tahun 2022 adalah 76,08%, pada tahun 2023 realisasi Skor PPH adalah 67,99 % turun sebesar 8,09%. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 68%, dengan capaian kinerjanya adalah 99,99%. Hasil ini menunjukkan

capaian kinerja yang sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023 sebesar 68%, capaiannya sudah mencapai 99,99 %.

Target dan pencapaian kinerja indikator ini, tergambar sebagai berikut

Tabel 8. Target dan Realisasi Indikator Skor PPH Ketersediaan.

Indikator	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra 2023	Capaian s/d 2023 terhadap 2023
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	76,08%	68%	67,99 %	99,99%	68%	99,99%

Rincian Pola Pangan Harapan Ketersediaan pada kelompok bahan pangan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Tahun 2023.

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor Rill	Skor PPH	Skor Maks
1.	Padi-padian	1.229	51,2	0,5	25,61	25,00	25,0
2.	Umbi-umbian	32	1,3	0,5	0,67	0,67	2,5
3.	Pangan Hewani	175	7,3	2,0	14,54	14,54	24,0
4.	Minyak dan Lemak	689	28,7	0,5	14,36	5,00	5,0
5.	Buah/biji Berminyak	2	0,1	0,5	0,03	0,03	1,0
6.	Kacang-kacangan	95	4,0	2,0	7,95	10,00	10,0
7.	Gula	104	4,3	0,5	2,16	2,16	2,5
8.	Sayuran dan Buah	61	2,5	5,0	12,62	12,62	30,0
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.387	99,5		77,96	67,99	100,0

Hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya target adalah sebagai berikut :

- Adanya perubahan penghitungan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kota Tanjungpinang

- Akses transportasi dan distribusi pangan yang kurang baik.
- Kurangnya ketersediaan data dari Instansi Lintas Sektoral (Karantina Pertanian) dan Pemasok Pangan

Pelaksanaan program yang mendukung tercapainya sasaran pada tahun 2023, adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota dengan sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota .Indikator program pada kegiatan tersebut adalah Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (beras) di tingkat konsumen.Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pemasokan dan Harga Pangan , dengan sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan dan Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan,dengan Indikator Program kegiatan tersebut adalah Angka Kecukupan Energi Ketersediaan dan Angka Kecukupan Protein Ketersediaan, dengan tingkat capaian tergambar sebagai berikut :

Tabel 10. Indikator dan Capaian Program pada Sasaran Meningkatnya Ketersedian Pangan.

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023		% Capaian	Status *)
			Realisasi	Target	Realisasi		
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	- Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (Beras) di Tingkat Konsumen.	%	1	<1 0	3,5	100	- Sangat Tinggi
	- Angka Kecukupan Energi Ketersediaan	Kkal/kap/hari	2519	2340	2387	102,00	Sangat Tinggi

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023		% Capaian	Status *)
			Realisasi	Target	Realisasi		
	- Angka Kecukupan Protein Ketersediaan	Gr/kap/hari	73,18	61	61,01	100,02	sangat Tinggi

Status capaian kinerja Indikator Persentase Maksimum Koefisien Harga Pangan Pokok (Beras) di Tingkat Konsumen Sangat Tinggi, sedangkan status capaian kinerja indikator program Angka Kecukupan Energi Ketersediaan Sangat Tinggi Dan status capaian kinerja indikator program Angka Kecukupan Protein Ketersediaan Sangat Tinggi

Sasaran Strategis II :

Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan

Diindikasikan dengan Indikator sasaran, yaitu :

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.

Indikator Skor PPH konsumsi adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama dari suatu pola konsumsi. Skor PPH maksimal 100%, berdasarkan PPH ini, konsumsi pangan tidak diharapkan tidak hanya mencukupi kebutuhan gizi, namun juga keseimbangan gizi, cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penetapan dan pencapaian kinerja indikator ini, pada Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 11. Target dan Realisasi Indikator Skor PPH Konsumsi.

Indikator	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra 2023	Capaian s/d terhadap 2023
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi.	92,6%	95%	91,10 %	95,00 %	95%	95,00%

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan adalah 95% dan realisasinya 91,10% dengan capaian kinerja sangat tinggi yaitu 95,00 %. Realisasi Tahun 2023 ada penurunan jika dibandingkan dengan Skor PPH konsumsi tahun 2022 yaitu sebesar 1,50%. Target akhir Renstra, tahun 2023 ditetapkan sebesar 95%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun ini maka capaiannya sebesar 95 %.

Rincian Pola Pangan Harapan konsumsi pada kelompok bahan pangan tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 12. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi Tahun 2023.

No.	KelompokPangan	Konsumsi Energi Perhari			Konsumsi Protein Perhari		
		Kkal/Kapita	%	%AKE*)	Gram/kapita	%	%AKP
1.	Padi-padian	1060	50	50,5	23,8	33,9	41,7
2.	Umbi-umbian	48	2,3	2,3	0,5	0,7	0,9
3.	Pangan Hewani	385	18,2	18,3	33,9	48,4	59,5
4.	Minyak dan Lemak	319	15	15,2	0	0,1	0,1
5.	Buah/biji Berminyak	9	0,4	0,4	0,1	0,2	0,2
6.	Kacang-kacangan	60	2,8	2,8	5,3	7,6	9,4
7.	Gula	63	2,9	3	0,3	0,4	0,5
8.	Sayuran dan Buah	120	5,7	5,9	4,3	6,2	7,6
9.	Lain-lain	58	2,7	2,8	1,7	2,4	3,
	Jumlah	2.121	100	101	70	100	122,8

Belum tercapainya target pada indikator ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Dimana jumlah rata-rata energi tertinggi berasal berasal dari padi-padian sebesar 1.060 kkal/kapita/hari sedangkan jumlah rata-rata energi terendah berasal dari kelompok biji/buah berminyak yaitu 9 kkal/kapita /hari. Dalam hal ini dapat

dikatakan bahwa situasi konsumsi pangan penduduk Kota Tanjungpinang secara agregat belum memenuhi kecukupan gizi dengan mutu yang relatif rendah.

- Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, dimana masyarakat masih mengikuti kebiasaan makan asal kenyang dengan porsi yang tidak sesuai dengan pola makan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas konsumsi pangan adalah Program Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat. dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan Indikator program yang terukur sebagai berikut :

Tabel 13. Indikator dan Capaian Program pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan.

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023		% Capaian	Status *)
			Realisasi	Target	Realisasi		
1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	- Angka Kecukupan Energi Konsumsi	gr/kap/hari	2283	2150	2121	98,65	ST
	- Angka Kecukupan Protein Konsumsi	gr/kap/hari	78,4	74	70	94,59	ST
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Produk Pangan asal tumbuhan yang aman dan sehat	%	95	95	95	105	ST

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023		% Capaian	Status *)
			Realisasi	Target	Realisasi		
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Produk Pangan asal hewan yang aman dan sehat	%	67	90,46	65	71,85	S
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian							

Kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat yaitu Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal kegiatan ini bertujuan : Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga, meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar, memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan secara lestari. Dalam kegiatan ini keluaran yang dihasilkan Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang menerima bantuan ada sebanyak 18 kelompok P2L (Rumah Bibit, Kompos, Tanah Hitam, dll) Perlombaan KWT Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota Tanjungpinang, Pelatihan KWT peserta 41 KWT. Selain itu Program yang mendukung adalah Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam kegiatan ini keluaran yang dihasilkan adalah 1 Dokumen.

Selanjutnya Program yang mendukung adalah Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan. Dalam kegiatan ini keluaran yang dihasilkan telah dilakukan pengawasan peredaran pangan asal hewan sebanyak 4 (empat) kali. Pengawasan dilaksanakan pada saat menjelang hari besar, pengawasan pada tempat penampungan / penjualan hewan kurban dan masjid/mushola tempat pemotongan hewan korban sebanyak 18 lokasi, lebelisasi dan pembinaan terhadap penjual hewan kurban, pasar tradisional dan pasar swalayan. Selain pengawasan dilakukan juga sosialisasi kepada masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi di media elektronik.

Dan Program selanjutnya yang mendukung sasaran ke 2 ini adalah Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dan Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan. Tujuan dari Kegiatan ini adalah Terpeliharanya Bangunan Prasarana RPH dan fasilitas pendukung lainnya sehingga pelayanan operasional RPH babi lebih optimal, karena tahap yang sangat menentukan kualitas dan keamanan daging dalam mata rantai penyediaan daging adalah tahap di Rumah Potongan Hewan (RPH). Dalam Kegiatan ini keluaran yang dihasilkan adalah jumlah Rumah Potong Hewan yang direhabilitasi/dipelihara sebanyak 1 (satu) unit.

Status capaian kinerja pada indikator Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat Tinggi, hal ini disebabkan oleh :

- Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan Tempat Pemotongan Unggas (TPU) yang belum memenuhi syarat hygiene sanitasi dan tidak memiliki izin sebagai legalitas usaha pemotongan hewan / ternak.
- Tingginya permintaan konsumen akan karkas ayam hangat (langsung dipotong di tempat) sehingga mendorong maraknya pemotongan ayam

pinggir jalan yang tidak sesuai kaidah higiene sanitasi dan berpotensi mencemari lingkungan.

- Minimnya anggaran untuk memfasilitasi permohonan pelatihan juru sembelih halal ternak kurban bagi panitia kurban mesjid / musholla.
- Minimnya anggaran kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan dimana target yang dialokasikan terbatas sehingga kurang optimal disamping belum ada dukungan produk hukum daerah yang mengatur detail perizinan usaha, lalu lintas produk hewan dan kewajiban atas pemenuhan persyaratan teknis kesmavet pada unit usaha Pangan Asal Hewan

Sasaran Strategis III :

Meningkatnya produktivitas pertanian peternakan.

Diindikasikan dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu :

1. Persentase rata-rata peningkatan produktivitas pertanian.

Penetapan dan pencapaian kinerja indikator ini, pada Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 14. Target dan Realisasi Indikator Persentase rata-rata peningkatan produktivitas pertanian.

Indikator	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra 2023	Capaian s/d 2023 terhadap 2023
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase rata-rata peningkatan produktivitas pertanian.	11,2%	20%	20%	100%	23%	86,96%

Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan adalah 20% dan realisasinya 20% dengan capaian kinerja Sangat Tinggi, yaitu 100 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 ada kenaikan persentase rata-rata peningkatan produktivitas pertanian dari 11,2% menjadi 20% yaitu 8,8%. Jika

dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023, realisasinya baru mencapai 86,96%.

Angka persentase rata-rata peningkatan produktivitas pertanian diperoleh dari angka produktivitas tahun ini dikurangi angka produktivitas tahun lalu dibagi angka produktivitas tahun lalu dikali dengan 100. Sedangkan angka produktivitas diperoleh dari nilai produksi dibagi dengan luas panen. Oleh sebab itu angka produktivitas sangat ditentukan oleh produksi. Untuk mendukung tercapainya produksi pertanian, Program yang dikembangkan adalah Program Penyuluh Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Pertanian Target dan capaian program tersebut sebagai berikut :

Tabel 15. Indikator dan Capaian Program pada Meningkatnya produktivitas Pertanian.

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023		% Capaian	Status *)
			Realisasi	Target	Realisasi		
Program Penyuluh Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura.	Ton	818,27	1.225	1352,82	110,43	Sangat Tinggi
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan.	Ton	80,80	109	85,35	78,30	Tinggi
	Jumlah Produksi Tanaman Palawija/Pangan	Ton	161,35	560	250,45	44,72	Sangat Rendah
	Cakupan bina kelompok	%	109,52	100	100	100,00	Sangat Tinggi
Program Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Pertanian	Penurunan Disparitas Harga antara Produsen dan Konsumen.	%	76,64	48	48,01	99,98	Sangat Tinggi

Status Capaian Kinerja Pada Indikator Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Sangat Tinggi , sedangkan Tanaman Perkebunan kategori Tinggi,hal ini dikarenakan rata-rata tanaman perkebunan di Kota Tanjungpinang sudah tidak produktif, petani kurang berminat untuk menanam tanaman perkebunan karena membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil dan juga dikarenakan keterbatasan lahan. Sedangkan capaian kinerja pada jumlah produksi tanaman Palawija/Pangan kategori sangat rendah dikarenakan keterbatasan lahan , petani lebih berminat ketanaman hortikultura, karena harga jual tanaman pangan lebih murah dan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan tanaman hortikultura.

Sementara untuk indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok dan Penurunan Disparitas Harga Antara Produsen dan Konsumen dengan kategorie Sangat Tinggi.

Produksi pertanian di Kota Tanj.ungpinang yang banyak dikembangkan adalah komoditas palawija dan hortikultura. Perkembangan luas tanam, luas panen dan produksi tahun 2022 dan 2023, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 16 . Luas Tanam, Luas panen dan produksi pertanian Kota Tanjungpinang.

No.	Komoditas	Luas Tanam (Ha)			Luas Panen (Ha)			Produksi (Ton)		
		2022	2023	(+/-)	2022	2023	(+/-)	2022	2023	(+/-)
1	Hortikultura	579,86	544,58	(35,28)	186,72	166,51	(20,21)	818,27	1352,82	534,55
2.	Perkebunan	490,53	450,71	(39,82)	176,00	178,60	2,60	80,80	85,35	4,55
Jumlah		1.070,39	995,29	(85,10)	362,72	345,11	(17,61)	899,07	1.438,17	539,10

Angka produksi tanaman hortikultura dibandingkan dengan tahun lalu ada kenaikan sebesar 534,55 Ton, hal ini disebabkan karena adanya bantuan yang diberikan kepada petani mulai dari pupuk, dan bibit sehingga mempengaruhi 10 produksi. Menurunnya luas tanam tahun 2023 disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan walaupun luas

tanam berkurang dengan adanya sekolah lapang dan kegiatan-kegiatan penyuluhan lainnya dapat meningkatkan produksi pertanian tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya.

Untuk mendorong tercapai target indikator sasaran meningkatnya produktivitas pertanian dilaksanakan beberapa program dan kegiatan serta sub kegiatan antara lain :

1. Program Penyuluh Pertanian

Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

a. Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota.

Kegiatan ini meliputi 1 (satu) komoditas yaitu Cabe , Adapun tujuan kegiatan ini dilakukan untuk melatih petani dalam meningkatkan produksi lipat ganda (proliga) cabe, hingga angka produktivitas cabe mencapai 20 ton per ha.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi 3 unit. Sedangkan hasil/Out come dari kegiatan ini adalah meningkatnya SDM pertanian yang berkualitas 46 kelompok

b. Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan sarana pertanian, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah kelembagaan petani di Kecamatan dan Desa Yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 46 unit. Sedangkan hasil/Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya SDM Pertanian yang berkualitas 46 Kelompok.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan.

a. Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

Tujuan dari Kegiatan ini adalah menambah fasilitas penunjang di Kebun Koleksi Tanaman Buah-Buahan Tropika, Meningkatkan produksi pertanian di Kota Tanjungpinang, dan menambah keindahan di kebun koleksi sehingga para pengunjung merasa tertarik

Kebun Koleksi Tanaman Buah-buahan Tropika ini luasnya mencapai 5 Ha, saat ini dirawat oleh penjaga kebun sebanyak 10 orang, jumlah tanaman buah tropika yang ditanam sebanyak 64 spesies.

Keluaran dari kegiatan ini terpeliharanya dengan baik Kebun Koleksi Tanaman Buah-Buahan Tropika seluas 5 Ha(pupuk, pestisida, peralatan pertanian, serta alat pemeliharaan lainnya) dan Pusat Pembibitan Sapi 1 unit , serta pengadaan bibit jambu kristal sebanyak 500 batang dan bibit jeruk kasturi sebanyak 500 batang yang diserahkan untuk 4 kecamatan.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Pertanian

Tolak ukur keberhasilan Program Penyediaan dan Pengembangan Pra Sarana Pertanian adalah pada indikator penurunan disparitas harga antara produsen dan konsumen, target yang ditentukan 48 % realisasi 48,01%, capaiannya Sangat tinggi mencapai 99,98%. Keberhasilan program ini karena didukung oleh :

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

a. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Tujuan dan maksud pelaksanaan untuk menyediakan sarana dan prasarana pemasaran hasil pertanian untuk mewujudkan stabilitas harga produk pertanian dan mengurangi disparitas harga produk pertanian. Keluaran kegiatan berupa Gerai Pangan dengan melibatkan petani sebagai sebagai pelaku usaha pemasaran secara langsung tanpa melalui tengkulak. Pada kegiatan ini keluaran yang diwujudkan adalah tersedianya meja, kursi, dan tenda serta bangunan gerai sebagai tempat berjualan petani, ambong, timbangan, cool box, keranjang dan caping.

Untuk memaksimalkan pemasaran di Gerai Pangan, dibutuhkan strategi yang tepat dan efektif dalam pemasarannya dengan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya. Di Tahun 2023 output pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya Gerai Pangan (Pembangunan Gapura Gerai Pangan) dan Pusat Pembibitan Sapi (Jasa Konsultasi Perencanaan Rehabilitasi Pusat Perbibitan Sapi)

2. Jumlah Populasi Ternak.

Jumlah populasi ternak sebagai indikator kedua pada sasaran meningkatnya produktivitas pertanian peternakan. Jumlah populasi ternak terdiri dari jumlah ternak hewan besar, hewan kecil dan unggas. Target dan realisasi indikator ini, pada tahun 2023 adalah :

Tabel 17. Target dan Realisasi Indikator Jumlah Populasi Ternak

Indikator	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra 2023	Capaian s/d 2022 terhadap 2023
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Jumlah Populasi Ternak	320.183 ekor	378.721 ekor	293.227 ekor	77,00 %	378.721 ekor	77,00%

Pada tahun 2023, target indikator jumlah produksi ternak yang ditetapkan sebesar 378.721 ekor realisasinya sebesar 293.227ekor, dengan

capaian kinerja tinggi sebesar 77,00%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu ada penurunan dari 320.183 ekor menjadi 293.227 ekor.

Perkembangan populasi menurut jenis ternak, sebagai berikut :

Tabel 18. Perubahan Jumlah Populasi Ternak Tahun 2022 dan 2023.

Jenis Ternak	Jumlah Populasi Ternak (ekor)		Peningkatan/ Penurunan
	Tahun 2022	Tahun 2023	
Ternak Hewan Besar	251	826	575
Ternak Hewan Kecil	622	699	77
Ternak Hewan Unggas	319.310	291.702	(27.608)
Jumlah	320.183	293.227	(26.956)

Adanya penurunan jumlah populasi ternak yaitu ternak hewan unggas dari 319.310 ekor menjadi 291.702 ekor, penurunan sebesar 8,65% Sedangkan pada populasi ternak hewan besar dan kecil terjadi peningkatan, yaitu ternak hewan besar 229,08% dan hewan ternak kecil naik 12,38% . Hal-hal yang mempengaruhi adanya penurunan populasi unggas dan peningkatan pada populasi ternak besar dan kecil adalah :

- Kontribusi populasi unggas terbesar adalah dari komoditas ayam ras. Fluktuasi harga sapronak dan harga pasar berdampak pada biaya produksi, hal ini menjadi pertimbangan bagi pelaku usaha yaitu peternak untuk mengurangi masa tanam dan mengalihkan sementara kegiatan usaha budidaya broiler ke lini usaha lain.
- Peningkatan populasi ternak besar dan kecil dikarenakan wabah kasus PMK (Penyakit Mulut Kuku) yang sudah bisa tertangani sehingga telah dibuka kembali lalu lintas antar wilayah karena bibit berasal dari Luar Daerah.

Dalam mewujudkan tercapainya sasaran meningkatnya produktivitas khususnya pada peternakan, maka ditetapkan beberapa program. Pada Tahun 2023, program yang dilaksanakan adalah Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana

Pertanian. Pengukuran capaian kinerja program, diukur dengan tolak ukur indikator sebagai berikut :

Tabel 19. Indikator dan Capaian Program pada Meningkatnya produktivitas Peternakan.

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023		% Capaian	Status *)
			Realisasi	Target	Realisasi		
1. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.	Tingkat Kematian Ternak	%	3,05	2,00	2,40	80,00	Tinggi
	Penurunan Jumlah Kasus penyakit Hewan Menular.	%	19,51	2,00	2,56	128	Sangat Tinggi
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi peternakan	ton	3106,55	3472	3457,19	99,57	Sangat Tinggi

Indikator Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian , capaian kinerjanya sangat tinggi ditunjukkan pada indikator tingkat kematian ternak, indikator penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular dan indicator Jumlah Produksi Peternakan . Pelaksanaan kegiatan-kegiatannya dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

1. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

a.Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Tujuan Pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya obat-obatan serta pendukung operasional puskeswan sehingga pelayanan kesehatan hewan lebih optimal.

Target kegiatan ini adalah upaya meningkatkan peran pusat kesehatan hewan (puskeswan) kampung bugis dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak maupun program utama Kementan yaitu Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) yang dilakukan melalui :

- Pengobatan/penanganan segera terhadap ternak yang sakit serta peningkatan stamina ternak. Hal ini sangat penting karena kualitas hijauan Makanan Ternak (HMT) di wilayah Kota Tanjungpinang masih tergolong rendah dalam pemenuhan nutrisi minimal.
- Penanganan gangguan reproduksi pada betina untuk meningkatkan produktivitas ternak dalam rangka mendukung
- Optimalisasi active service, sinkronisasi Birahi dan layanan Inseminasi Buatan (IB) ke lokasi peternak
- Pelayanan terpadu kesehatan hewan kepada kelompok ternak
- Surveilans klinis penyakit hewan dalam rangka deteksi dini
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) penyakit hewan dan manajemen/tata laksana penyakit hewan.
- Penyediaan sarana obat-obatan dan perlengkapan medis dan non medis.

Keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah hewan yang ditangani sebanyak 155 ekor, dan terwujudnya penurunan tingkat kematian ternak 2 % dan penurunan kasus penyakit hewan sebanyak 2 %

2. Kegiatan Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Maksud pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pencegahan dan penanggulangan masuk dan menularnya penyakit Mulut dan Kuku di wilayah Kota Tanjungpinang sedangkan Tujuan dari Kegiatan ini adalah kesiapsiagaan terhadap Penyakit PMK serta mempertahankan status Zona Hijau PMK dan nol kasus PMK.

Ruang lingkup kegiatan ini adalah melakukan penyediaan data Hewan Rentan PMK (HRP), pengawasan lalu lintas HRP, peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat, koordinasi dan konsolidasi serta pengamatan/ deteksi dini PMK, peningkatan status kesehatan dan kekebalan HRP, penyediaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan darurat PMK.

Indikator keluaran kegiatan ini adalah jumlah surveilans sebanyak 1 jenis Penyakit Hewan Menular yaitu penyakit PMK serta jumlah masyarakat yang diberikan KIE sebanyak 50 orang.

Untuk Tahun 2023 kegiatan ini tidak dilaksanakan karena di Recofusing anggaran, dan telah tertanganinya PMK sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain

a. Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain

Tujuan dari Kegiatan ini adalah meningkatkan populasi, produksi peternakan melalui budidaya skala rumah tangga, memenuhi kebutuhan protein hewani tingkat rumah tangga peternak dan memberikan stimulan bagi masyarakat untuk mengembnagkan usaha peternakan.

Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana peternakan, yaitu bibit ayam kampung sebanyak 360 ekor dan pakan ternak terdiri dari jagung giling sebanyak 500 kg dan konsentrat petelur layer 500 kg.

Hasil yang ingin dicapai adalah mendorong pencapaian produksi ternak yang ditetapkan untuk jumlah produksi Ternak tahun ini 3.307 ton. Dengan adanya pengembangan unggas dapat menambah populasi dan meningkatkan produksi khususnya ayam kampung.

*Sasaran Strategis IV :
Meningkatnya produktivitas perikanan.*

Diindikasikan dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu :

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.

Potensi perikanan di Kota Tanjungpinang cukup besar, mengingat Kota Tanjungpinang sebagai daerah kepulauan yang memiliki luas laut 107,96 km² atau 41,71% dari luas wilayah Kota Tanjungpinang. Oleh sebab itu salah satu indikator untuk mengukur pencapaian sasaran RPJMD di Kota Tanjungpinang pada urusan kelautan dan perikanan adalah Jumlah Produksi Perikanan Tangkap. Untuk mengukur pencapain target tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Target dan Realisasi Indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.

Indikator	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra 2023	Capaian s/d Trget akhir Renstra 2023
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.	3.572,86 Ton	3.700 Ton	4.385,24 Ton	118,52%	3700 Ton	118,52%

Dari target yang ditetapkan pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap adalah 3.700 ton, terealisasi sebesar 4.385,24 ton dengan capaian sangat tinggi sebesar 118,52 %. Realisasi produksi tahun ini dibandingkan tahun lalu ada kenaikan sebesar 685,24 ton. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2023 capaian kinerjanya mencapai 118,52 %.

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya capaian kinerja sasaran adalah:

- Pulihnya Perekonomian di Bidang usaha perikanan tangkap.
- Adanya Penambahan Kapal-kapal besar (izin pusat dan provinsi bertambah)
- Pencatatan produksi kapal pukat sudah dilaksanakan.

Untuk mencapai target pada indikator Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, program yang dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. Namun karena keterbatasan anggaran Tahun 2023 tidak menganggarkan untuk Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.

2. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya.

Potensi perikanan selain penangkapan adalah potensi pengembangan budidaya dengan memanfaatkan pesisir laut dan darat. Indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya juga merupakan salah satu tolok ukur dalam pencapaian sasaran RPJMD pada sektor perikanan. Capaian target indikator jumlah produksi perikanan budidaya sangat tinggi yaitu 121,71 % Realisasi produksi tahun ini ada kenaikan dari 166,23 Ton menjadi 182,57 Ton. Hasil ini jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023 sebesar 150 Ton, maka capaiannya sudah mencapai 121,71%. Hasil pengukuran indikator ini sebagai berikut :

Tabel 21. Target dan Realisasi Indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya.

Indikator	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra 2023	Capaian s/d terhadap 2023
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	166,23 Ton	150 Ton	182,57 Ton	121,71%	150 Ton	121,71%

Sesuai potensi wilayah Kota Tanjungpinang, produksi perikanan budidaya didukung oleh perikanan budidaya laut dan budidaya air tawar. Kontribusi terbesarnya ada pada Budidaya air tawar dibandingkan dengan budidaya air laut. Produksi perikanan budidaya sangat ditentukan oleh faktor luas areal budidaya dan jumlah Rumah Tangga Pembudidaya (RTP) . Dalam perkembangannya jika dibandingkan dengan tahun lalu ada penambahan luas areal budidaya dan jumlah RTP. Luas areal budidaya bertambah dari 85,36 Ha menjadi 85,36 Ha dan RTP pembudidaya juga bertambah dari 421 RTP menjadi 554 RTP. Selain itu terjadi peningkatan hasil produksi dari tahun sebelumnya dimana pada tahun ini produksi perikanan budidaya mengalami kenaikan dari 166,23 ton menjadi ton (kenaikan 34,62%), kenaikan terbesar terjadi pada komoditas budidaya air tawar. Hal ini terlihat dari tabel berikut ini :

Tabel 22. Luas Areal Budidaya, RTP dan Produksi Perikanan Budidaya.

No.	Komoditas	Luas Areal Budidaya (Ha)			Jumlah RTP			Produksi (Ton)		
		2022	2023	(+/-)	2022	2023	(+/-)	2022	2023	(+/-)
1.	Perikanan Budidaya Air Tawar.	64,74	64,13	(0,61)	382	394	12	137,78	150,03	12,25
2.	Perikanan Budidaya Air Laut.	20,62	18,37	(2,25)	172	198	26	28,45	32,54	4,09
Total		85,36	82,50	(2,86)	554	592	38	166,23	182,57	16,34

Adanya kenaikan jumlah produksi perikanan budidaya disebabkan oleh :

- permintaan pasar yang banyak
- adanya bantuan dari pemerintah sehingga meningkatkan produksi perikanan

- **Persentase Rata-rata Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya.**

Tabel 23. Target dan Realisasi Indikator Persentase Rata-rata Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya.

Indikator	Realisasi 2022	2023			Target Akhir Renstra 2023	Capaian s/d 2021 terhadap 2023
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase Rata-rata Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya.	33,53%	17%	17,19 %	101,00%	17%	101,00%

Produktivitas merupakan pengukuran dimana produksi dilakukan secara maksimal dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada. Angka produktivitas perikanan budidaya ditentukan oleh jumlah produksi dan luas lahan budidaya. Dalam sasaran keempat meningkatnya produktivitas perikanan, realisasinya sangat tinggi nilainya 101,00%, Faktor yang mempengaruhi sama halnya dengan permasalahan pada indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya. Untuk mencapai target pada indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya, program yang dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Perikanan Budidaya. Pencapaian target programnya sebagai berikut :

Tabel 24. Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023		% Capaian	Status *)
			Realisasi	Target	Realisasi		
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	166,23	150	182,57	121,71	Sangat tinggi
	Persentase Pembudidaya Ikan Menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik.	%	70,00	90	80	88,89	Tinggi

Capaian indikator jumlah Produksi perikanan budidaya, sebesar 121,71%. Ada Kenaikan produksi dibandingkan dengan tahun lalu, dari 166,23 ton menjadi 182,57 ton. Dan Persentase Pembudidaya Ikan Menerapkan Cara Budidaya Ikan Yang baik tahun 2023 yaitu 80 % dengan target 90% , realisasi capaian 88,89 %. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya hasil program adalah :

1.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

1. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

a. `Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota

Kegiatan ini bersumber dari APBD Kota Tanjungpinang dan DID Tahun Anggaran 2023. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan kelompok pembudidaya ikan air tawar di wilayah Kota Tanjungpinang. Tujuan nya mendorong peningkatan produktivitas usaha budidaya air tawar dan meningkatkan pendapatan masyarakat pembudidaya ikan air tawar Kota Tanjungpinang.Keluaran dari kegiatan ini adalah Pengadaan sarana dan prasarana Budidaya Ikan lele di dalam ember sebanyak 600 unit

b. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota

Kegiatan ini bersumber dari APBD Kota Tanjungpinang Dana Insentif Daerah (DID)TA 2023. Keluaran dari kegiatan ini adalah Pemberian Bantuan kepada 6 kelompok berupa Bibit lele 20.000 ekor, Pakan Kasar 1250 kg, Pakan Halus 750 Kg

*Sasaran Strategis V :
Meningkatnya Daya Saing Produksi Perikanan.*

Diindikasikan dengan Indikator sasaran, yaitu :

Nilai Ekspor Perikanan.

Penetapan dan pencapaian kinerja indikator ini, pada Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 25. Target dan Realisasi Indikator Nilai Ekspor Perikanan.

Indikator	Realisasi 2022(Rp/tahun)	2023			Target Akhir Renstra 2023 (Rp/tahun)	Capaian s/d 2022 terhadap 2023
		Target (Rp/tahun)	Realisasi (Rp/tahun)	Capaian Kinerja		
Nilai Ekspor Perikanan.	27.988 998.370	19.416.796 405	7.051.462. 000	36,06%	19.416. 796.405	36,06%

Indikator Nilai ekspor perikanan untuk mengukur sasaran daya saing produk perikanan, target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar Rp 19.416.796.405,- realisasinya sebesar Rp. 7.051.462.000 dengan capaian Sangat Rendah yaitu 36,06%. Jika dibandingkan dengan jumlah ekspor perikanan tahun lalu ada penurunan dari Rp Rp 19.416.796.405,- menjadi Rp Rp 27.988.998.370

Penyebab turunnya nilai ekspor adalah disebabkan Karena saat ini eksportir mengirim ikan via Kota batam dan Kabupaten Bintan sehingga tidak tercatat sebagai ekspor dari Kota Tanjungpinang. Untuk mencapai sasaran Meningkatkan Daya Saing Produksi Perikanan, program yang dilakukan adalah Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Indikator program ini adalah nilai konsumsi ikan. Namun tahun 2023 karena keterbatasan anggaran tidak dilaksanakan sub kegiatan ini.

Tabel 26. Capaian Indikator Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023		% Capaian	Status *)
			Realisasi	Target	Realisasi		
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Konsumsi Ikan	Kg/kap/hari	48,68	44	49,84	113,27	Sangat tinggi

Capaian indikator nilai konsumsi ikan sebesar 49,84 kg/kap/hari Ada kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu, dari 48,68 kg/kal/hari menjadi 49,84 kg/kap/hari.:

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sumber dana Anggaran APBD Kota Tanjungpinang Tahun 2023 untuk Belanja sebesar Rp 14.394.479.584,- terdiri dari Belanja Operasi Rp 13.574.162.852,- dan Belanja Modal Rp.820.316.732

Tabel 27. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Uraian	Jumlah (Rp)	
	Target	Realisasi
PENDAPATAN	72.000.000	67.890.000
BELANJA DAERAH	14.394.479.584	13.678.145.107
Belanja Operasi	13.574.162.852	12.871.943.303
1. Belanja Pegawai	6.892.348.587	6.669.317.887
2. Belanja Barang dan Jasa	6.593.932.265	6.118.025.416
3. Belanja Hibah	87.882.000	84.600.000
Belanja Modal	820.316.732	806.201.804
4. Belanja Modal Peralatan &Mesin	461.273.564	449.079.500
5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	204.043.168	202.665.804
6. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	155.000.000	154.456.500

Pendapatan pada Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kota Tanjungpinang salah satu upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Retribusi Daerah sesuai Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha. Jenis retribusinya adalah Retribusi Rumah Potong Hewan. Pendapatan yang ditetapkan pada Tahun 2023 sebesar Rp 72.000.000,-. Realisasinya sebesar Rp 67.890.000 capaiannya 94,29 %. Belanja Operasi yang ditetapkan sebesar Rp 13.574.162.852,- realisasinya sebesar Rp 12.871.943.303 atau persentase realisasi belanjanya 94,82 %. Yang terdiri dari Belanja Pegawai yang ditetapkan sebesar Rp 6.892.348.587,- dengan realisasi Rp 6.669.317.887 atau 96,76 % dan Belanja Barang jasa ditetapkan Rp. 6.593.932.265,- realisasinya sebesar Rp 6.118.025.416 atau 92,78 %, sementara Belanja Hibah yang ditetapkan sebesar Rp 87.882.000 realisasinya sebesar Rp 84.600.000 atau 96,26 % dan Belanja Modal ditetapkan sebesar Rp. 820.316.732,- terealisasi Rp. 806.201.804 atau 98,27%. Dengan rincian realisasi per jenis belanjanya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 28. Rincian Realisasi Belanja Daerah Per Kelompok Belanja Ta 2023.

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Belanja Pegawai	6.892.348.587,-	6.669.317.887	96,76
Belanja Barang dan Jasa	6.593.932.265	6.118.025.416	92,78
Belanja Hibah	87.882.000	84.600.000	96,26
Belanja Modal	820.316.732	806.201.804	98,27
JUMLAH	14.394.479.584	13.678.145.107	95,02

Belanja Daerah ditetapkan untuk membiayai 8 (Delapan) program,18 (Delapan belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan. Berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan pada masing-masing program kegiatan dan sub kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisiknya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 29. Realisasi Belanja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2023:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN %
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.417.001.651	10.013.395.363	96,13
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.892.348.587	6.669.317.887	96,76
	1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.892.348.587	6.669.317.887	96,76
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	693.444.400	627.696.322	90,52
	2.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.604.000	10.578.000	99,75
	2.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.499.400	26.445.675	99,80
	2.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	129.457.000	128.399.000	99,18
	2.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.122.000	59.711.130	99,32
	2.5 Penyediaan Bahan/Material	7.500.000	7.500.000	100,00
	2.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	304.262.000	240.606.017	79,08
	2.7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	155.000.000	154.456.500	99,65
	3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	393.089.600	383.250.000	97,50
	4.1 Pengadaan Mebel	42.948.700	41.890.000	97,53

	4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.140.900	341.360.000	97,49
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.728.555.064	1.628.551.884	94,21
	5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	164.301.200	151.891.779	92,45
	5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.564.253.864	1.476.660.105	94,40
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	681.564.000	678.757.270	99,59
	5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	449.252.000	447.897.951	99,70
	5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.680.000	46.093.010	98,74
	5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.784.000	188.594.300	99,26
	5.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.848.000	29.706.699	99,53
	6. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	28.000.000	25.822.000	92,22
	6.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000	12.784.500	91,32

	6.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000	13.027.500	93,13
II.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	584.341.400	487.737.028	83,47
	1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah, Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	234.833.800	227.092.800	96,70
	1.1 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	234.833.800	227.092.800	96,70
	2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	89.121.000	7.217.400	8,10
	2.1 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	89.121.000	7.217.400	8,10
	3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	260.386.600	253.426.828	97,33
	3.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (DAU)	260.386.600	253.426.828	97,33
III.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	44.300.000	42.800.000	96,61

	1. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	44.300.000	42.800.000	96,61
IV.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.060.619.000	1.028.316.380	96,95
	1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.060.619.000	1.028.316.380	96,95
	1.1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (DAU,DID)	321.605.000	318.081.380	98,90
	1.2 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (DAU,DID)	739.014.000	710.235.000	96,11
V.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.	577.143.300	549.736.610	95,25
	1. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	500.585.300	484.379.610	96,76
	1.1 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	500.585.300	484.379.610	96,76
	2. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	76.558.000	65.357.000	85,37
	2.1 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya	76.558.000	65.357.000	85,37

	dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain (DAU, DID)			
VI.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	339.651.282	333.032.753	98,05
	1. Pembangunan Prasarana Pertanian.	339.651.282	333.032.753	98,05
	1.1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan RPH	30.028.964	27.340.940	91,05
	1.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	309.622.318	305.691.813	98,73
VII.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	277.896.951	217.347.888	78,21
	1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	0		
	1.1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	0		<i>refocusing</i>
	2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	207.592.262	156.166.358	75,23
	2.1 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	207.592.262	156.166.358	75,23
	3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	70.304.689	61.181.530	87,02
	3.1 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	70.304.689	61.181.530	87,02

VIII	Program Penyuluhan Pertanian	1.093.526.000	1.005.779.085	91,98
	1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.093.526.000	1.005.779.085	91,98
	1.1 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	262.560.000	191.859.058	73,07
	1.2 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota (DAU,DID)	830.966.000	813.920.027	97,95

Secara umum pelaksanaan dan serapan anggaran APBD Tahun Anggaran 2023, tidak ada permasalahan. Namun ada satu sub kegiatan yang mengalami Tunda Bayar yaitu Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota

Kegiatan-kegiatan diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai dengan target dan perencanaan. Realisasi fisik untuk semua kegiatan mencapai 100%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DPPP Kota Tanjungpinang dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, Disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah. Penyusunan Laporan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan tugas DPPP Kota Tanjungpinang pada Tahun 2023 diselenggarakan dalam 5 (lima) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja, yang walaupun penuh dengan berbagai hambatan dan tantangan namun tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam Pencapaian kinerja DPPP Kota Tanjungpinang tersebut terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang dapat memenuhi target dengan kriteria capaian sangat tinggi, 1 (satu) indikator yang kriteria capaiannya tinggi, dan 1 (satu) indikator yang kriteria capaian sangat rendah.

Target kinerja tersebut perlu dievaluasi pencapaiannya, sehingga apabila terdapat hal-hal yang dianggap dapat mengakibatkan tidak tercapainya target, dapat secara dini dibuat langkah-langkah strategis yang mengarah tercapainya target. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam

rangka mengatasi masalah/hambatan serupa di tahun yang akan datang, telah dirumuskan beberapa strategis yang dapat dilakukan, terutama terhadap indikator kinerja yang belum memenuhi target.

Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada kepala daerah, maupun seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Dinas PPP Kota Tanjungpinang. Selain itu, melalui LAKIP ini pula diharapkan adanya umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Dengan demikian, LAKIP dapat dijadikan pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, serta dengan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.